

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Melalui penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa peran UN Women mengalami kendala yang signifikan mengatasi Gender Apartheid di Afghanistan. Kondisi ini terlihat dari bagaimana UN Women kurang memerhatikan aspek Interseksionalitas yaitu Diskriminasi majemuk dan berlapis dan *Single axis framework*, kombinasi kedua dimensi Interseksionalitas ini membentuk implikasi utama yang menunjukkan penindasan yang sistematis terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan etnis Hazara yang beraliran paham Syiah. perempuan Hazara mengalami diskriminasi majemuk dan berlapis akibat dari tumpang tindih penetapan 70 dekret Taliban yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia dan juga persinggungan identitas, gender, etnis, aliran paham minoritas, kelas sosial, hingga lokasi geografis yang menciptakan subordinasi ganda dan pengalaman yang unik. tidak hanya itu diskriminasi majemuk oleh perempuan Hazara juga di akibatkan oleh hambatan internal Afghanistan yang tidak terbuka pada kasus gender, hal ini terlihat dari internal Afghanistan yang di dominasi oleh suku pashtun yang menetapkan "*Pashimwali*" sebagai landasan, yang menghormati laki-laki dan menyampingkan perempuan.

Kompleksitas oleh perempuan Afghanistan juga di perparah oleh kebijakan UN Women sebagai lembaga pemberdayaan perempuan, yang kebijakannya cenderung menggunakan kerangka analisis tunggal (*Single Axis Framework*) dan pendekatannya cenderung universalistik mengadopsi pendekatan arus utama gender yang mengasumsikan bahwa perempuan adalah satu kategori yang seragam. hal ini diakibatkan karena pendekatan UN Women berlandaskan perjanjian CEDAW, yang merupakan konvensi yang dikritik keras karena kurang mengaitkan atau merujuk pada aspek identitas perempuan yang beragam, perjanjiannya juga kurang mempertimbangkan diskriminasi berdasarkan ras, aliran paham minoritas, etnis, status migrasi identitas gender, orientasi seksual, disabilitas, usia, hingga kondisi

sosial ekonomi. kondisi ini juga di tandai oleh bagaimana UN Women juga masih cenderung berfokus pada perempuan Afghanistan secara umum atau pada kerentanan perempuan Afghanistan secara luas, tanpa adanya kerangka khusus menangkap pengalaman unik dan saling terkait dari perempuan Hazara.

Kedua dimensi ini menegaskan bahwa diskriminasi majemuk dan berlapis yang dialami perempuan Hazara semakin sulit terputus akibat dari kebijakan internasional, termasuk kebijakan UN Women yang kurang dirancang dengan perspektif Interseksionalitas. alih-alih memecahkan persoalan diskriminasi kerangka kerja tunggal tersebut secara tidak langsung mempertahankan subordinasi kepada perempuan Hazara, dan gagal mengatasi akar persoalan berlapis. oleh karena itu pendekatan Interseksionalitas menjadi penting dalam perumusan kebijakan yang lebih inklusifitas, perlu adanya pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan Universalistik yang seragam menjadi pendekatan interseksionalitas, agar intervensi internasional benar-benar efektif dalam menjawab kompleksitas subordinasi ganda yang dihadapi perempuan rentan. Tanpa perubahan mendasar ini dengan perspektif Interseksionalitas, program-program perlindungan dan pemberdayaan UN Women akan terus mengalami kendala dan hambatan implementasi dan kurang mampu memberikan solusi yang memadai terhadap kondisi Gender Apartheid di Afghanistan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bagi UN Women untuk segera mengadopsi pendekatan interseksionalitas dalam kebijakannya menjawab kerentanan secara spesifik bagi perempuan di Afghanistan terutama perempuan etnis Hazara, dalam programnya juga harus kontekstual dan dirancang dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, serta kondisi lokal di wilayah Afghanistan. dengan pendekatan kontekstual ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dari kelompok rentan seperti Hazara dalam forum advokasi internasional dan proses pengambilan kebijakan, agar kebijakannya benar-benar relevan menjawab pengalaman unik yang mereka hadapi. Selanjutnya peneliti

juga memberikan saran untuk menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis interseksionalitas, yang sejenis dengan konsep *Gender Alert*, yang merupakan alat penyediaan sistem kemanusiaan yang menggambarkan kondisi perempuan dan juga terkait perkembangan situasi dan perkembangan prioritas perempuan. Peneliti berharap dengan sistem monitoring berbasis Interseksionalitas ini mencapai keberhasilan penanganan krisis perempuan Afghanistan khususnya etnis Hazara yang tidak hanya diukur dari indikator umum kesetaraan gender, tetapi juga dari kemampuan mengatasi diskriminasi majemuk dan memberdayakan perempuan yang terpinggirkan.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih dalam, bagaimana aspek interseksionalitas efektif untuk dikaji dalam memahami kompleksitas gender apartheid di Afghanistan. kurangnya penelitian secara spesifik menyoroti interseksionalitas menjadi masukan penting menjawab kendala UN Women mengatasi Gender Apartheid di Afghanistan. penelitian mendatang diharapkan mampu mengevaluasi sejauh mana pendekatan interseksionalitas menjawab kebutuhan spesifik kelompok perempuan rentan Afghanistan, tidak hanya di Hazara saja. Hal ini penting agar intervensi internasional kebijakannya tidak hanya seragam dengan kerangka analisis tunggal nya, dan mampu memetakan dan merespon pengalaman perempuan dengan kelompok minoritas. Selain itu, oleh peneliti juga menyarankan untuk mengeksplorasi kebijakan lokal atau praktik komunitas berbasis budaya yang terbukti berhasil dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan, yang menyentuh perempuan kelompok rentan dan minoritas. Dengan memperdalam aspek tersebut akan memperkaya data kontekstual yang akan dijadikan berbagai landasan bagi design program UN Women yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan interseksionalitas.